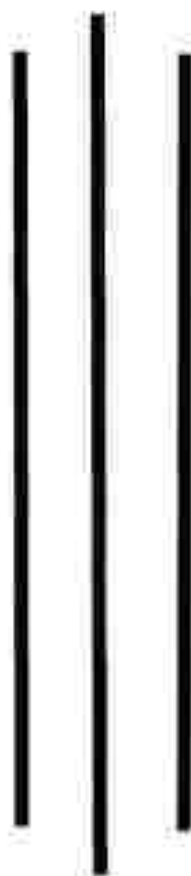




PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

**LAPORAN KERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)
TAHUN 2023**



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2023. Penyusunan LAKIP ini untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja pemerintahan dan pembangunan sesuai RKPD Tahun 2023 yang diukur dari capaian indikator sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang didukung oleh program/kegiatan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), serta pelayanan publik yang cepat, murah dan tuntas dengan didukung manajemen kinerja yang akuntabel, transparan dan berintegritas.

LAKIP yang telah disusun diharapkan mampu memberikan informasi bagi seluruh stakeholders mengenal pencapaian kinerja Diskominfo Kabupaten Dairi, serta dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta menjadi umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pencapaian target sasaran Diskominfo Kabupaten Dairi, serta tak lupa kami ucapkan banyak terimakasih kepada pegawai ASN dan non-ASN Diskominfo yang telah bekerja dengan penuh keikhlasan dan integritas tinggi, sehingga LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi dapat selesai disusun.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA KABUPATEN DAIRI



ANGGARA RAMCES SINURAT, ST

REMBINA TK

NIP. 19770323-200312 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
EXECUTIVE SUMMARY	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	6
E. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>) YANG DIHADAPI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. PERENCANAAN STRATEGIS	8
1. Rencana Strategis Tahun 2019-2024	8
B. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023	10
BAB III PERENCANAAN KINERJA	12
A. PENCAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12
B. REALISASI ANGGARAN	21
BAB IV PERENCANAAN KINERJA	24
A. KESIMPULAN	24
B. SARAN	24

EXECUTIVE SUMMARY

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Lkj Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja 2023. Penyusunan Lkj ini pada hakikatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2023.

Sebagai perwujudan pelaksanaan *good governance*, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi pada Tahun 2023, maka disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi tercapai sebesar 174,48% atau dalam kategori Baik. Untuk mendukung capaian kinerja Tahun 2023 telah direalisasikan anggaran belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp. 9.742.948.412,- dari anggaran belanja langsung Rp. 11.247.642.008,- dengan persenan capaian anggaran sebesar 86,62%.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi yang menjadi tujuan dari penyusunan Lkj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat akan bisa tercapai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja pemerintahan dan pembangunan sesuai RKPD Tahun 2023, yang diukur dari capaian indikator sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang didukung oleh program/ kegiatan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), serta pelayanan publik yang cepat, murah, mudah dan tuntas dengan didukung manajemen kinerja yang akuntabel, transparan dan berintegritas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan akhir pelaksanaan program kegiatan ini dimaksudkan

sebagai penjabaran secara ringkas tentang pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi yang telah dilaksanakan Tahun Anggaran 2023 dan berakhir pada bulan Desember 2023. Penyusunan Lkj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan Lkj, yaitu :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi.

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi yaitu tugas pokok Diskominfo adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten dalam fungsinya:

- a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika ;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika;
- d. pelaksanaan administrasi bidang komunikasi dan informatika;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan adanya tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi dalam mewujudkan pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang informasi dan komunikasi, maka diharapkan masyarakat akan lebih berpartisipasi dalam pemanfaatan komunikasi dan informatika, sehingga kebutuhan akan informasi yang didapatkan oleh masyarakat menjadi efisien, efektif dan interaktif.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Dairi sesuai dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Program Pelaporan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan aset.
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, yang membawahi :
 - a. Seksi Monitoring Opini dan Aspirasi Publik;
 - b. Seksi Pelayanan Informasi dan kehumasan.
4. Bidang Infrastruktur dan Komunikasi Informatika, yang membawahi 2 seksi :
 - a. Seksi Pengelolaan Infrastruktur teknologi informasi dan keamanan informasi;
 - b. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Pemerintahan;
5. Bidang Sumber Daya Komunikasi Publik dan Akses Informasi yang membawahi :
 - a. Seksi Media Bahan Komunkasi dan Akses Informasi ;
 - b. Seksi Statistik dan Persandian;

Bagan struktur organisasi Diskominfo Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar 1.1 :

Gambar 1.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagai berikut

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi sampai dengan 31 Desember 2023, tercatat sebanyak 68 orang terdiri dari 19 ASN dan 49 Pegawai Non ASN. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan, dan golongan dapat dilihat pada tabel 1.1 :

1. Berdasarkan Pangkat dan Golongan :

Tabel 1.1,
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Gol IV	4
2	Gol III	14
3	Gol II	-
4	Gol I	1
5	Tenaga Harian Lepas	49
	Total	68

2. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.2
Berdasarkan Jabatan

NO	ESELON	JUMLAH
1.	Eselon II.b	1
2.	Eselon III.a	1
3.	Eselon III.b	3
4.	Eselon IV.a	8
	JUMLAH	13

3. Berdasarkan Status Pendidikan PNS :

Tabel : 1.3

TABEL STATUS PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Pasca Sarjana	1
2.	Strata 1 (S1)	12
3.	D3	3
4.	D IV	-
5.	SLTA	2
6.	SLTP	1
	JUMLAH	19 Orang

Berdasarkan Tabel diatas diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SLTP dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2), berpendidikan S1 dan S2 (70%).

4. Berdasarkan Jenis Kelamin :

Tabel : 1.4

TABEL JENIS KELAMIN

DINAS KOMINFO	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
	9	10	19

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika secara umum mempunyai fungsi strategis yaitu : Meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan keterbukaan informasi sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses kebutuhan akan informasi khususnya yang bersifat terbuka (publik).

Jaminan akan keterbukaan informasi semakin dikuatkan dengan adanya Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU tersebut jelas disebutkan bahwa semua orang mempunyai hak untuk mengakses dan mendapatkan informasi publik yang tidak dikecualikan. Untuk mengawal pelaksanaan UU tersebut maka Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah diharapkan dapat membentuk Komisi Informasi. Pelayanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika telah menunjukkan kinerja yang baik.

E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG DIHADAPI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika selama kurun waktu 1 tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat ditetapkan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi yaitu :

- a. Pendistribusian bandwidth sebahagian masih menggunakan teknologi pemancar radio karena topologi daerah yang lebih banyak perbukitan, dimana teknologi ini rentan akan perubahan kondisi cuaca, air, gangguan serangga;
- b. Sumber daya manusia jurnalis belum optimal;
- c. Koordinasi dan Pertemuan atau Temu Pers dengan jurnalis atau media yang masih belum optimal
- d. Sumber Daya Manusia pengelola informasi dan dokumentasi belum optimal;
- e. Pendirian RPD 101.6 FM secara hukum masih dalam bentuk rancangan;
- f. Jangkauan frekwensi RPD 101.6 FM yang terbatas dan tidak mampu melakukan siaran jika keadaan hujan apalagi disertai petir
- g. Rendahnya integrasi dan kualitas data statistik sektoral.

Berdasarkan permasalahan yang timbul Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan rencana aksi (solusi) sebagai berikut :

1. Menerapkan penggunaan teknologi fiber optic (FO) yang nantinya pendistribusian bandwidth tidak berpengaruh atas perubahan kondisi cuaca, air, gangguan serangga;
2. Mengadakan workshop dan uji kompetensi untuk para jurnalis;
3. Lebih mengoptimalkan penggunaan media center, kerjasama media dan temu pers;
4. Mengadakan bimbingan teknis PPID terkait penyusunan daftar informasi publik dan uji konsekuensi informasi;
5. Mengalokasikan penyusunan Perda dan Perbup mengenai Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
6. Peremajaan peralatan Radio Public Dairi 101.6 FM dan pergantian alat baru studio RPD 101.6 FM;
7. Menjalni komunikasi dengan OPD sebagai sumber data sektoral untuk membenkan data yang akurat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. Rencana Strategis Tahun 2019-2024

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2019-2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang dicapai dalam tahun 2023 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang rasional. Untuk dapat diperhatikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Dairi 2019-2024 maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. VISI

Visi merupakan suatu keadaan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, Visi, adalah cita-cita atau kondisi ideal masa depan (*desired future*) daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 tahun

Berangkat dari kriteria-kriteria tersebut telah dirumuskan visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 yaitu :

**"MEWUJUDKAN DAIRI UNGGUL YANG MENYIJAHTERAKAN
MASYARAKAT DALAM HARMONI KEBERAGAMAN"**

b. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi serta menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi (Pemendagri No.54 Tahun 2010). Rumusan misi hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh

pemerintah daerah utamanya di Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mewujudkan visi daerah;

2. Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah;
3. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Dengan memperhatikan kriteria-kriteria tersebut, untuk mencapai Visi Misi Pembangunan Kabupaten Dairi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup Petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern, serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian.
2. Membangun kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing.
3. Meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam daerah secara arif bijaksana, profesional dan berwawasan lingkungan, penguatan sektor UMK (Usaha Mikro dan Kecil), serta pengembangan usaha ekonomi kreatif.
4. Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *Clean Government* (pemerintahan yang bersih) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika.

2. Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah membantu Bupati dalam mewujudkan visi ke- 5 yaitu Meningkatkan kualitas dengan tujuan terwujudnya kualitas pelayanan publik dan kuantitas pembangunan publik berbasis teknologi informatika. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan utamanya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi. Rumusan sasaran hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjeleakan tujuan;
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan

4. Memenuhi kriteria SMART-C (*specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve*)

Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :
Meningkatnya pelayanan komunikasi dan Informasi publik statistik serta persandian yang transparan akuntabel dengan dukungan teknologi Informatika.

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023

Berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Periode 2019-2024 dapat dilihat target kinerja jangka menengah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

**Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Infomasi	Indeks SPBE	2,70
	Persentase OPD menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	86%
	Predikat AKIP	B

Setiap sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan. Dengan demikian kegiatan merupakan perjabaran lebih lanjut.

B. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun ini. Sehingga nantinya terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi pada Tahun 2023 telah melakukan perjanjian kinerja dengan Bupati Dairi untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi telah melaksanakan 5 program dengan 10 kegiatan dan 27 sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Dairi sebesar Rp. 11.247.642.0084,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

A. PENCAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk pemeliharaan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan pada dokumen perencanaan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi selaku pengemban amanah urusan pemerintah dalam bidang komunikasi dan informatika melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi telah

dilaksanakan secara menyeluruh melalui Program dan Kegiatan yang menjadi tanggung jawab dinas. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang harus diwujudkan pada tahun 2023, yaitu :

1. Indeks SPBE
2. Persentase OPD menggunakan SPBE
3. Predikat AKIP

Tabel 3.1

Indikator Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima berbasis Teknologi Informasi	Indeks SPBE	2,70
	Persentase OPD menggunakan SPBE	88%
	Predikat AKIP	B

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra 2019-2024 dan Rencana Kerja Tahun 2023. Sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi :

Tabel 3.2

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi

No	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks SPBE			2,70	2,67	98,8 %
2	Persentase OPD yang mengimplementasikan SPBE			88%	85 %	75,5 %
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Di Tindak Lanjuti	100%	70%	70%
		Program Aplikasi Informatika	Persentase Pelayanan Publik Yang Diimplementasikan Secara Online dan Terintegrasi	88 %	65 %	75,5 %
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Yang Valid	100 %	100 %	100 %
3	Predikat BAKIP			B	-	-

Penetapan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2019 – 2024 pada Indikator Kinerja "Indeks SPBE" target setelah perubahan RPJMD adalah 2,70. Sementara realisasi pada tahun 2023 adalah 2,67. Nilai 2,67 ini merupakan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023. Persentase tingkat capaian adalah dengan membandingkan realisasi indikator kinerja dengan target indikator kinerja sehingga didapat nilai capaian adalah 98,8%.

2. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi disajikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Indikator dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi

No	TAHUN 2022		No	TAHUN 2023	
	INDIKATOR	REALISASI		INDIKATOR	REALISASI
1	Indeks SPBE	2,06	1	Indeks SPBE	2,67
2	Persentase OPD yang mengimplementasikan SPBE	63,07%	2	Persentase OPD yang mengimplementasikan SPBE	66 %
	- Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Di Tindak Lanjut	63,64%		- Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Di Tindak Lanjut	70%
	- Persentase Pelayanan Publik Yang Dielenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	49,58%		- Persentase Pelayanan Publik Yang Dielenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	65 %
	- Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Yang Valid	100 %		- Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Yang Valid	100 %
3	Predikat AKIP	-	3	Predikat AKIP	B

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Penerapan SPBE diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga bisa mencapai efisiensi, integrasi, dan berbagi pakai. Pada tahun 2023 realisasi pada Indeks SPBE adalah 2,67. Berdasarkan Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Dairi mendapat nilai 2,05 dan tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Dairi mengalami kenaikan indeks sebesar 0,65 sehingga nilai indeks SPBE menjadi 2,67. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan (LHP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan metodologi penilaian yaitu Metode Tingkat Kematangan SPBE. Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Penilaian Pemantauan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi melalui kegiatan penilaian mandiri dan penilaian dokumen. Domain Penilaian terdiri dari 4 yaitu Domain Kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE. Berdasarkan LHP SPBE Tahun 2023 dapat kami jelaskan bahwa beberapa aspek penilaian SPBE Kabupaten Dairi masih terdapat nilai 1,00 yaitu pada Domain Manajemen dapat kita lihat pada gambar 3.1.

Gambar 1.1 Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023

Item Indikator	Nilai 2023
SPBE	2,67
Domain Kebijakan SPBE	3,00
Kebijakan Internal dan Eksternal SPBE	3,00
Domain Tata Kelola SPBE	1,70
Pendidikan dan Pelatihan SPBE	1,50
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00
Pemeliharaan SPBE	1,50
Domain Manajemen SPBE	1,00
Pemilihan dan Penempatan SPBE	1,50
Audit TI	1,00
Domain Layanan SPBE	3,77
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,40
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,33

Implementasi SPBE di Kabupaten Dairi tentu tidak hanya dikerjakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tetapi harus dilaksanakan secara terintegrasi dan saling berkomitmen dengan beberapa instansi dalam rangka mencapai target Indeks SPBE sesuai target pada Perubahan Renstra 2019-2024.

Tabel 3.4

**Pengguna Aplikasi Layanan Pemerintah dan Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi**

No	Nama Layanan	Nama Aplikasi	Jumlah Pengguna Tahun 2023	Keterangan
1	Layanan gangguan TIK	silagatik.dairikab.go.id	177 laporan	Jumlah Laporan Pengaduan gangguan aplikasi dan jaringan internet
2	Layanan Presensi	iSen (ready on Play Store)	ASN pada 24 OPD	ASN Pemerintah Kabupaten Dairi
3	Layanan pengaduan masyarakat	sidumasda.dairikab.go.id	144 pengaduan	Jumlah pengaduan yang diterima
4	Layanan kedaruratan	NTPD 112 Kabupaten Dairi	30	Jumlah panggilan yang direpson

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 ditetapkan sebagai perangkat daerah yang mendukung pencapaian Misi ke-4 : "Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *clean government* (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah", Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi dalam hal penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Domain Layanan Pemerintah berusaha semaksimal mungkin dalam pembangunan/pengembangan aplikasi-aplikasi yang mendukung layanan kepada ASN itu sendiri misal silagatik.dairikab.go.id, aplikasi android mobile layanan presensi (iSen) dan sidumasda.dairikab.go.id yang diintegrasikan pada Layanan Dairi Siaga 112 dari sisi Domain Layanan Publik.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah

Tabel 3.5

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi

No	INDIKATOR	Target Akhir Ranstra	Realisasi	Persentase Capaian
		Tahun 2024	Tahun 2023	
1	Indeks SPBE	3	2,67	89%
2	Persentase OPD yang mengimplementasikan SPBE	91%	82%	71,42 %
	- Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Di Tindak Lanjut	90%	70%	77,77 %
	- Persentase Pelayanan Publik Yang Disienggarakan Secara Online dan Terintegrasi	100%	65%	65%
	- Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektorial Yang Valid	100%	62%	62%
3	Predikat AKIP	BB	B	B

4. Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten Dairi dengan Indeks SPBE Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.6

Indeks SPBE Kabupaten Dairi dibandingkan dengan Indeks SPBE Provinsi Sumatera Utara

No	Instansi	Target Nilai SPBE			Realisasi Nilai SPBE		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Kabupaten Dairi	2,0	2,50	2,70	2,07	2,05	2,67
2	Provinsi Sumatera Utara	NA	NA	3,0	2,77	2,81	3,21

5. Alokasi per Sasaran Pembangunan Perangkat Daerah

Tabel 3.7

Alokasi per sasaran Pembangunan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	% Capaian Anggaran
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prena berbasis Teknologi Informasi	Indeks SPBE	7.478.747.915	84,54%
	Persentase OPD yang mengimplementasikan SPBE		
	Predikat AKIP	3.768.894.092	90,74%

7. Permasalahan dan Solusi

Tabel 3.6

Permasalahan dan Solusi yang dihadapi pada Indikator Kinerja pada Tahun 2023
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi

NO	Indikator Kinerja	NAMA KEGIATAN/ PROGRAM	URAIAN/RINCIAN MASALAH (KAPAN DAN APA MASALAHNYA)	USAHA YANG TELAH DILAKUKAN (KAPAN, APA DAN BAGAIMANA)
1	2	3	4	5
1.	Indeks SPBE Persentase OPD yang mengimplem-entasikan SPBE	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.	Pada tahun 2023, pendistribusian bandwidth yang dikelola Dinas Kominfo Kab. Dairi ke 15 Kecamatan, 7 Kelurahan, 18 Puskesmas, 42 sekolah (8 SD dan 36 SMP) sebagian sudah menggunakan teknologi fiber Optik namun sebagian masih menggunakan teknologi pemancar radio karena topologi daerah yang lebih banyak berbukitan	Perencanaan penganggaran tahun 2023 sudah menerapkan penggunaan teknologi fiber optic (FO). Diharapkan dengan penggunaan FO ini nantinya pendistribusian bandwidth dapat berjalan dengan baik. Tidak berpengaruh atas kondisi cuaca, air.
		Layanan Hubungan Media	Banyak media hanya mencopy paste data informasi	Melakukan pelatihan dasar untuk Jurnalis
			Kompetensi wartawan masih kurang	Melaksanakan uji kompetensi wartawan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme
		Pelayanan Informasi Publik	SDM pengelola informasi dan dokumentasi	Bimbingan teknis PPID terkait penyusunan daftar informasi publik dan uji konsekuensi informasi yang dikucualkan
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Perda tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal sejak didirikan RPD 101.8 FM tahun 2007 belum memiliki dasar pondirian secara hukum	- Prolegda tahun 2023 dan dalam Perencanaan penganggaran tahun 2023 sudah mengalokasikan penyusunan Perda dan Perbup tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal, direncanakan selambat-lambatnya masa sidang ke 2 tahun 2023 - Perda sudah disusun tetapi masih dalam bentuk rancangan
			Jangkauan frekuensi RPD yang terbatas dan tidak mampu meluaskan siaran jika keadaan hujan apalagi disertai pelir, siaran terpaksa dihentikan	Perencanaan penganggaran tahun 2023 sudah mengalokasikan pembelian alat baru untuk siaran RPD FM
		Penyelenggaraan Otomasi Statistik Sektoral di Daerah	- Belum adanya pengelolaan Data Statistik Sektoral di masing-masing OPD - Publikasi secara berkala di aplikasi Isidari tidak berjalan dengan baik	- Tahun 2023 sudah ditetapkan Perbup tentang Satu data dan upaya evaluasi pengelolaan data statistik sektoral dimulai dari 10 opd penting dengan mengajukan rekomendasi statistik ke BPS Kab. Dairi. Mempersiapkan Aplikasi Statistik di Kabupaten Dairi dengan nama Isadari yang akan dipergunakan tahun 2024 - Sudah menginformasikan penyediaan SDM kepada Sekretaris Daerah

6. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	% Capaian 2023		Pagu	Realisasi	% Capaian 2023	
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima berbasis Teknologi Informasi	Indeks SPBE	2,70	2,67	98,88%	Program Informasi dan Komunikasi Publik				2,69
	Persentase OPD yang mengimplementasikan SPBE	86%	85%	75,56%	Program Aplikasi Informatika	7.478.747.916	6.322.703.479	84,54%	
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				
	Predikat AKIP	B	B	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	3.768.894.092	3.420.244.933	90,74%	

7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

a. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Merupakan salah satu Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi yang telah ditampung DPA Tahun Anggaran 2023. Salah satu kegiatannya adalah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan ini adalah Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Pelayanan Informasi Publik dan Layanan Hubungan Media ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan ini terkadang mengalami teknis yaitu banyak media hanya mengcopy-paste data informasi, kompetensi wartawan masih kurang, kurangnya koordinasi dengan jurnalis atau media, kurangnya SDM pengelola informasi dan dokumentasi, belum memiliki dasar pendirian secara hukum untuk lembaga penyiaran publik lokal RPD 101.6 FM. Jangkauan frekuensi RPD yang terbatas dan tidak mampu melakukan siaran pada saat keadaan hujan yang disertai petir.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Merupakan salah satu Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi yang telah ditampung DPA Tahun Anggaran 2023. Salah satu kegiatannya adalah Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan ini adalah Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah, Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik, Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kegiatan ini terkadang mengalami teknis yaitu pendistribusian bandwidth masih menggunakan teknologi pemancar radio pita lebar dimana teknologi ini rentan akan perubahan kondisi cuaca, air, gangguan serangga.

c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Merupakan salah satu Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi yang telah ditampung DPA Tahun Anggaran 2023. Salah satu kegiatannya adalah Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan ini adalah Membangun Metadata Statistik Sektoral. Pelaksanaan kegiatan ini terkadang mengalami teknis yaitu Belum adanya pengelolaan Data Statistik Sektoral di daerah dan publikasi secara berkala.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi dalam hal penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Domain Layanan Pemerintah berusaha semaksimal mungkin dalam pembangunan/pengembangan aplikasi-aplikasi yang mendukung layanan kepada ASN itu sendiri melalui website silagatik.dairikab.go.id, aplikasi android mobile layanan presentasi (iSen) dan website sidumasda.dairikab.go.id yang diintegrasikan pada Layanan Dairi Siga 112 dari sisi Domain Layanan Publik.

B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran

NO	KEGIATAN/PROGRAM	PAOU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.247.642.008	9.742.948.412	86,62 %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.758.894.892	3.429.244.933	90,78 %
1	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.497.000	5.378.000	71,74 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.497.000	5.378.000	71,74 %
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.107.224.896	1.943.541.080	92,23 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.107.224.896	1.943.541.080	92,23 %
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	609.148.800	649.918.961	93,90 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.609.900	17.609.900	100 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.317.950	131.310.600	99,99 %
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	25.107.650	25.107.650	100 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	52.200.000	32.200.000	61,68 %
	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	472.913.000	443.690.811	93,82 %
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	643.029.098	487.627.427	64,27 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.096.000	84.266.123	63,33 %
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.134.800	14.858.800	81,94 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	391.798.298	358.482.504	91,50 %
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.894.800	363.779.465	88,30 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	175.056.500	148.341.900	84,74 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertinain Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.679.100	2.027.565	18,99 %
	Pemeliharaan/Renabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	226.259.200	213.410.000	94,32 %
8	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.553.878.800	2.990.378.161	84,00 %

NO	KEGIATAN/PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
I	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.553.970.800	2.985.375.161	84,00 %
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	284.015.000	215.171.000	75,76 %
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	195.311.000	183.024.954	93,71 %
	Pelayanan Informasi Publik	304.880.000	251.648.000	85,82 %
	Layanan Hubungan Media	1.528.168.500	1.405.008.500	91,94 %
	Kemilisan dengan pemangku kepentingan	145.016.000	-	-
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	613.224.200	477.006.097	77,79 %
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	483.258.100	443.512.800	91,78 %
III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.786.334.816	3.233.168.658	85,42 %
I	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.803.881.800	2.829.564.338	90,22 %
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.803.881.800	2.629.564.338	93,75 %
	Pengelolaan e government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	981.353.016	703.894.320	71,70 %
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	88.667.400	65.865.856	74,06 %
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	557.108.116	427.941.954	76,81 %
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	335.577.500	209.986.500	62,57 %
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	88.084.300	62.072.300	72,11 %
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	88.084.300	62.072.300	72,11 %
I	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	88.084.300	62.072.300	72,11 %
	Penyelenggaraan Organisasi Statistik Sektoral di Daerah	88.084.300	62.072.300	72,11 %
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	53.558.000	42.097.360	78,60 %
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	53.558.000	42.097.360	78,60 %
I	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	53.558.000	42.097.360	78,60 %
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sesi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28.995.000	22.311.000	66,15 %
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	27.653.000	19.786.360	71,53 %
	JUMLAH TOTAL	11.247.642.008	9.742.948.412	86,62%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi dari bulan Januari 2023 - Desember 2023 telah dilaksanakan dan didapat hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran 87%. Selain kegiatan operasional rutin, beberapa kegiatan yang menjadi tugas pokok telah terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan, maka kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi selama tahun 2023 sebagaimana uraian data tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran persentase capaian Sasaran Strategis pada Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2023 sebesar 174,45% (*Baik*) yang sesuai dengan target Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2023 pada predikat AKIP yaitu B (*Baik*);
2. Hasil pengukuran persentase capaian Sasaran Strategis dalam penggunaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi pada Tahun 2023 sebesar 85,62% (*Baik*);
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi membelanjakan dana secara efisien sehingga penggunaan anggaran dapat dihemat dari yang disediakan dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Belanja Langsung 2023	<u>11.247.642.008</u>
Realisasi	<u>9.742.948.412</u>
Saldo (efisiensi)	1.504.693.596.-

Hal ini berarti terjadi efisiensi Rp. 1.504.693.596.- (11,95%) dari anggaran yang disediakan.

B. SARAN

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi di masa mendatang antara lain :

- Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder dan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dan keterbukaan informasi publik yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Akses di Dinas Komunikasi dan Informatika untuk masyarakat melalui pembinaan, pelatihan serta peningkatan pengetahuan masyarakat dalam teknologi informasi dan komunikasi.
- Kondisi kapasitas internet yang ada dapat terus ditingkatkan dalam menunjang

kinerja di seluruh OPD yang ada di Kabupaten Dairi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023 untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang, sekian dan terima kasih.

Sidikalang, Januari 2024



NIP: 197703232003121005

DOKUMENTASI KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAHUN 2023

1. Media Massa (Radio) Konvensional



Streaming



2. Media Massa (Online)





3. Media Sosial

Website : www.portal.dairikab.go.id



4. Media Sosial lainnya (Facebook, twitter, instagram, youtube) Pemerintah Kabupaten dairi (<https://www.facebook.com/pemerintahkabdairi>)



Twitter Pemerintah Kabupaten Dairi

(https://x.com/kab_dairi?t=Jwre2wQFSVvKscIT 14EYw&s=06)



Instagram Pemerintah Kabupaten Dairi

(<https://www.instagram.com/pemkabdairi/>)



Youtube Pemerintah Kabupaten Dairi

(<https://www.youtube.com/@diskominfodairi6821>)

